

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Laksbang.
- Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, 2019, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Perkembangan dalam Praktik*, Depok: Rajawali Pers.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Syahrizal, 2006, *Peradilan Konstitusi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amir Ilyas dan Apriyanto Nusa, 2017, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis, Amir Ilyas, 2022, *Hukum Acara Pidana*, cet. 6, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group.
- Anang Shophan Tornado, 2018, *Praperadilan Sarana Perlindungan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Nusa Media.
- D.Y. Witanto, 2019, *Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik*, Depok: Imaji Cipta Karya.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, 2015, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.



Djonaedi Efendi, 2018, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, cet. 1, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group.

Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, cet. 4, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016, *Laporan Hasil Penelitian: Penafsiran Kosntitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

M. Farouq, 2022, *Hukum Acara Peradilan Pajak Komparatif Yudisial dan Teknisi Litigasi Sengketa Perpajakan*, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group.

M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, cet. 15, Jakarta: Sinar Grafika.

Maria Farida Indrati S. 2020, *Ilmu Perundang-undangan*, Sleman: PT Kanisius.

Martitah, 2015, *Sistem Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) di Indonesia*, Jakarta: Konpress.

r Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.



Marwan Mas, 2017, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Marwan Mas, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Ni'matul Huda, 2019, *Ilmu Negara*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, 2011, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Nusa Media.

Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok: RajawaliPers.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, cet. 8, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.

Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Zaka Firma Aditya, 2020, *Asas Retroaktif Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Teori dan Praktik*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.



## **Skripsi/Tesis**

Daud Yaferson Dollu, 2019, *Gugurnya Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Endyani dan Syafriel Hevitha, 2022, *Norma Hukum dalam Pemeriksaan Notaris Bersifat Tertutup Untuk Umum Oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Heny Hendriyawati, 2021, *Kekuatan Hukum Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Dimasa Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara*, Skripsi, Universitas Komputer Indonesia.

Inche Sayuna, 2016, *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Universitas Sebelas Maret.

Irene Angelita Rurgian, 2020, *Prinsip Proporsionalitas dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik*



*Indonesia 1945 (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)*,  
Skripsi, Universitas Airlangga.

Maria Magdalena Ine Sambikakki, 2020, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan MA.RI Nomor 2722 K/PDT/2014)*,  
Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Muhammad Zainal Abidin, 2012, *Perumusan Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Skripsi, Universitas Airlangga.

Moh. Yuslan Al Fariq, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (Studi Perbandingan Hukum Acara Perdata Umum Tentang Penggunaan Bantuan Teknologi Informasi Dalam Pembuktian)*,  
Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

### **Jurnal dan Majalah**

Afif Khalid, 2014, *Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume VI Nomor 11, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin.

Agung Barok Pratama, Aminah, Mohammad Jamin, 2017, *Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013*, Jurnal



Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume V Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Almas Tsaqibbirru Rosidi el Amin, 2023, *Praperadilan Sebagai Sarana Perlindungan Atas Hak Korban Tindak Pidana*, Jurnal Madani Hukum, Volume 1 Nomor 2, BSP Publisher, Karanganyar.

Antoni Putra, 2023, Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 20 Nomor 1, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Christiani Widowati, 2013, *Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan*, Adil: Jurnal Hukum, Volume IV Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Enrico Simanjuntak, 2019, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 16 Nomor 1, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Fajar Laksono Soeroso, et.al., 2013, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI*, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 4, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2006, *"Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan"*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Edisi No. 248 Bulan Mei 2006.



Maesa Plangiten, 2013, *Fungsi dan Wewenang Lembaga Praperadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, eJurnal Unsrat, Volume II Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Ni Putu Rai Yuliantini, 2015, *Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 1 Nomor 1, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali.

Raihan Andhika Santoso, Elan Jaelani, Utang Rosidin, 2023, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Volume I Nomor 4, Universitas Katolik Widya Karya, Malang.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan.

Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.



Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 – 3624058, FAX : 0411 – 3634667  
WEBSITE : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id) EMAIL : [pn.makassar@gmail.com](mailto:pn.makassar@gmail.com)  
MAKASSAR 90111

Makassar, 23 April 2024

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W22-U1/ 36 /PB.01/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

**MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Annisa Nurul Mutmainnah**  
No.Pokok : B011201036  
Program Studi : Hukum /Ilmu Hukum  
Judul : **Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 102/PUU-  
XIII/2015 Terhadap Gugurnya Praperadilan Dalam  
Hukum Acara Pidana Di Indonesia**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar,pada tanggal 18 April 2024 sampai dengan 22 April 2024.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan tanggal 20 Maret 2024 Nomor : 11140/UN4.5.1/PT.00/2024

WAKIL KETUA  
  
**MOEHAMMAD PANDJI SANTOSO, S.H., M.H.**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

- Yth Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar,  
- Yth Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur